

Konteks Demokrasi Lokal dan Problemantika Otonomi Daerah

Sumarlin Maate

Pasca sarjana Universitas Muslim
Indonesia

Abstrak

Demokrasi dan problemantika otonomi merupakan dua elemen politik yang dalam sistim tata-negara, terus menjadi hal yang sering mempengaruhi tatanan sosial masyarakat baik pada aspek pelayanan maupun perlindungan terhadap ahak asasi manusia. Otonomi merupakan proses pelaksanaan demokrasi, yang lahir dari pergulatan politik kenegaraan untuk meruntuhkan suatu rezim yang totaliter dan nsentralistik dapat digantikan menjadi rezim yang demokratis dan desentralisasi agar pelaksanaan cita-cita konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Dimana demokrasi dan otonomi tidak lagi melahirkan para penguasa lama yang menggunakan kekuatan uang yang diperoleh dari hasil jarahan orde namun melahirkan pemimpin yang mampu menbciptakan pemerintahan yang kondusif sesuai dengan asas demokrasi dan cita-cita UUD-NRI 1945. Kata kunci demokrasi, akuntabilitas, pemerintahan daerah, dan perlindungan HAM.

a. Pendahuluan

Asal-usul Demokrasi merupakan suatu sistem politik, dapat ditelusiri sampai pada sekitar abad lima sebelum masehi, ketika orang-orang yunani membentuk kota. Tokoh-tokoh yunani sebagai penggagas demokrasi yunani kuno antara lain adalah Solon, tokoh pembuat Hukum (638-558 SM), Chleisthenes, bapak demokrasi Athena, (508 SM), Pricles, jendral-negarawan (490-429 SM), dan Domesthenes, negarawan-orator (385-322 SM).¹. Masing-masing dengan kemampuannya membela demokrasi sebagai sistim politik yang terbaik, dimana para warga negara sendiri yang langsung membuat keputusan-keputusan politik dan mengawasinya, terdapat ekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalam hal meberikan suara, kebebasan politik kewarga-negaraan dijamin sepenuhnya, dan dalam proses penentuan kebijakan bila semua argument telah dipaparkan, *voting* atau pemungutan suara dilakukan. Namun konsep demokrasi ini mengalami masa transisi dan mendapat kritik yang tajam oleh Plato dan Aristoteles, saat Athena

¹ *Demokrasi dan Proses Politik.* (Jakarta- LP3ES, 1986), h. ix.

runtuh dalam perang peloponnesia yang berlangsung selama 27 tahun, dan dimenangkan Sparta yang otoriter. Kemenangan Sparta ini membuat dua filsuf Yunani menyampaikan kritik yang tajam terhadap demokrasi, kedua tokoh ini bukan pendukung demokrasi namun menjadi tokoh pengkritik demokrasi, dimana menurut keduanya demokrasi merupakan sistem yang berbahaya dan tidak praktis. Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filsuf dengan perhitungan, bahwa seorang raja sekaligus filosof mempunyai kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh kedepan. Sedangkan Aristotle yakin bahwa pemerintahan berdasarkan pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog dan akhirnya merosot menjadi kediktatoran, bahkan menurut Aristoteles demokrasi mudah meluncur menjadi ke arah tirani. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari para filsuf Yunani dan mengalami berbagai perubahan konsep mulai dari pemerintahan yang ranahnya *people by the people or the people* hingga kompetisi bagi mereka yang memiliki kemampuan baik dari segi ekonomi, politik, dan intelektual. Konsep politik demokrasi merupakan suatu konsep yang lahir dari transisi politik yang pernah ada dari monarki, oligarki, tirani, dan republik konstitusi².

Sistem politik demokrasi, tentunya dapat terukur manakala ada sistem politik yang konstitusional. Dimana demokrasi akan tumbuh manakala proses demokrasi yang dijadikan indikator dengan adanya pemilihan umum yang tidak mengukur dari aspek suku, agama, dan ras. Namun yang dijadikan ukuran demokrasi adalah sistem politik dan pemilu dapat berjalan dengan model partisipatif bukan mobilisasi, hal ini merupakan suatu bentuk sistem dimana demokrasi merupakan suatu cara bagaimana suatu masyarakat bertindak apabila ada demokrasi. Pendapat yang bertentangan, satu sama lain mengenai tindakan dan kebijaksanaan pemerintah biasanya diselesaikan dengan tidak melakukan perang saudara. Dengan politik, rakyat menentukan ukuran – ukuran untuk memutuskan segala sesuatu dan memilih pemimpin-pemimpin pemerintahan, untuk melaksanakannya sehingga tercapai hasil yang dapat diterima oleh golongan manapun yang penting dalam masyarakat³.

Namun realitas yang terlihat dimana politik lokal, yang dipraktikkan dengan model demokrasi langsung sering menjadikan isu konservatif sebagai bentuk praktek

² S.P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta, pustaka utama graffiti, 1995), h. 4-5.

³ D.C. Coyle. *sistem politik suatu negara demokrasi* (Djakarta, endang 1955), h. 1

demokrasi lokal. sehingga sulit menentukan substansi demokrasi, maka yang terjadi hanya suatu sistem sosial yang transisi sehingga sulit melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Hal ini dikarenakan berbagai dinamika politik yang dipraktikkan dalam bentuk oligarki politik, sehingga membangun sistem demokrasi yang totaliter dan despot dengan menjadikan senjata dan sistem ekonomi yang autarki merupakan akar fundamental. Teorinya dibangun berdasarkan *developmentalisme* dan sosiologi strukturalis dimana transisi demokrasi bagi Negara Indonesia merupakan transisi demokrasi yang lahir dari fakta sosial pemerintahan kasta hindu/budha, sultanistik, dan birokrasi dagang ala VOC serta Jesuit.

Transisi demokrasi ini, bukan merupakan suatu cerita yang tidak memiliki makna filosofis sehingga dalam praktek demokrasi di Indonesia fakta-fakta pergeseran sosial sering mengakibatkan konflik vertikal dan horizontal diakibatkan adanya kelompok lama (*status-quo*) dan kelompok baru yang lahir karena pengaruh perubahan politik (*borjuasi*). Dinamika pergeseran kekuasaan ini yang dibingkai dalam watak demokrasi, yang dimobilisasi sesuai dengan watak penguasa sehingga sulit bagi rakyat terlibat dalam sebuah agenda demokrasi secara substansi, dalam catatan sejarah republik Indonesia perubahan sistem sangat dipengaruhi oleh dinamika hindu/budha, islam, protestan dan khatolik. Dimana semua warisan, pemerintahan ini justru menggeser sistem sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya dinamika politik yang dibangun dalam komunal klen dan wilayah kini dirubah dengan suatu sistem politik yang lahir dari pengaruh budaya politik luar dalam kondisi ini sehingga format demokrasi Indonesia baik dalam sistem nasional dan lokal masih terus berpengaruh pada konteks elit politik yang sudah terbiasa menjadikan paradigma *developmentalisme* dengan pendekatan finansial terus saja dipraktikkan dengan gaya pragmatism namun dengan adanya perubahan sistem maka semua komponen didalam sistem demokrasi terus mencari format yang ideal sehingga budaya, sosial, dan alam yang dijadikan wadah untuk dipertahankan dari krisis yang dialami yang merupakan krisis multidimensional yaitu krisis lingkungan, pangan, energi, dan finansial.

Meskipun ini dijadikan rel demokrasi, sehingga politik dan demokrasi dapat dilaksanakan dengan model pemilihan langsung agar dapat melahirkan pemimpin dalam sistem politik demokrasi yang dapat menjawab keberlangsungan kapital sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Demokrasi yang berorientasi budaya, yang

lebih pada perlindungan terhadap hak sosial masyarakat lokal maupun nasional sehingga mampu melahirkan kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita demokrasi yang tertuang dalam konstitusi. Dimana demokrasi dapat menjadikan budaya, social masyarakat yang lebih berorientasi pada institusi social yang dijadikan ranah pengambilan keputusan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat diatas cosmos yang merupakan karunia sang khalik. Demokrasi dan kosmologi, merupakan sistim alam dimana merupakan ruang matra, tempat berlangsungnya sisitem social dan budaya masyarakat. Hal ini hanya akan dapat dijadikan suatu asas hidup dan norma yang dipatuhi mana kala hal ini dapat dijelmakan dalam bentuk developmentalisme social, ekonomi, politk, dan budaya. Sehingga rakyat dapat terlibat secara pertisipatoris bukan mobilisator, yang dilakukan oleh para elit yang terlibat dalam setiap momentum demokrasi baik local maupun nasioanal.

Demokrasi dapat berlangsung manakala semua pihak dapat mengutus wakilnya, dalam sistim pemerintahan sehingga hasil-hasil demokrasi mampu memberikan kualitas yang dapat diterima oleh semua golongan dalam masyarakat. Namun hal ini bagi Negara pasca colonial demokrasi langsung masih merupakan tesa yang sulit untuk mendapatkan pemimpin yang dapat menjawab berbagai kepentingan semua golongan yang terlibat dalam demokrasi. Sehingga keterlibatan para golongan yang memiliki otoritas dalam demokrasi meskipun dilakukan dengan model demokrasi diskursif yang melibatkan semua golongan dalam memberikan edukasi politik agar hak kewarganegaraan dan kewajiban kewarganegaraan dapat dipahami sebagai produk demokrasi yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pola realasi social dengan tidak menjadikan perbedaan suku, agama, dan ras, Sebagai alasan untuk menjadikan kesenjangan demokrasi sebab hal di atas merupakan hak yang asasi yang diperoleh sejak manusia lahir dimuka bumi.

B. Pembahasan

1. Problematika otonomi daerah.

Sedikitnya ada empat tantangan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia, dalam mempraktekan sistim demokrasi dimana kendala yang dihadapi baik dari aspek internal maupun eksternal. Diakibatkan pengaruh perkembangan pola pikir manusia, dalam perkembangan dalam ilmu pengetahuan dimana industri merupakan suatu bentuk nyata dari perkembangan pola pikir manusia. Dengan menjadikan konsepsi idiologi kapitalisme dan sosialisme, sebagai sarana untuk

menggapai nilai-nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. dimana kendala ini akan diimplementasikan dalam empat bentuk bagi masyarakat dunia ke tiga diantaranya, aliansi borjuasi internasional, aliansi intelektual-birokrat, aliansi militer-birokrat, dan aliansi borjuasi local. Empat hal ini merupakan suatu bentuk potret yang sangat imposibel dalam fakta pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga melahirkan politisasi demokrasi.

a. Fanatisme otonomi daerah

Ontology demokrasi, merupakan sebuah bangunan sistim politik yang melibatkan semua kalangan dengan tidak membedakan latar belakang golongan sehingga dapat melahirkan sistim pemerintahan yang melayani bukan dilayani. Namun dalam realitasnya dalam berbagai agenda demokrasi baik dalam konsep maupun fakta dalam setiap momentum politik di daerah baik dalam pemilu kada maupun pemilihan legislatif masih saja polarisasi isu demokrasi dibangun diatas fanatisme sempit antara dominasi mayoritas dan minoritas sehingga berdampak pada demokrasi yang dibangun diatas sentiment etnis dan agama.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, semangat emosional karena meras senasib di derah penjajahan kini tereduksi jika problem demokrasi saat ini dilokal masih saja terjadi konflik komunal yang setiap momentum demokrasi sering konflik didistribusi melalui instrument wilayah, agama, dan adat dengan slogan atas nama putra daerah. Padahal hakikat dari demokrasi langsung, merupakan perubahan sistim politik ketatanegaraan yang dibangun di era orde baru dengan tipe totalitarianism diatas sistim sentralisasi sehingga pemerataan pembangunan tidak terdistribusi dengan baik mengakibatkan sebagian wilayah termarjinalkan dalam pergaulan nasional maupun local. Membawa dampak pada pola hidup, dimana perlindungan atas nama klas dan entitas merupakan suatu bentuk capital social yang harus dilindungi dari efek ketidak merataan pembangunan sehingga mengakibatkan ada wilayah yang terbelakang atau peri-perial dan dijadikan sebagai satelit untuk menyanggah daerah induk. Akibatnya pengaruh perubahan politik pada 21-05-1998, membawa dampak pada perubahan tatanan system demokrasi

dan pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi dengan menjadikan pemilu langsung sebagai model demokrasinya dan dengan capaian yang akan diperoleh dari sistem tersebut yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. empat hal ini, jika ditinjau dari aspek konstitusi merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dipenuhi Negara bangsa yang berdaulat, tentunya asas desentralisasi merupakan bentuk kongkrit dalam aspek pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintahan sehingga dapat terpenuhi apa yang menjadi cita-cita Negara (alinea 4 UUD, 1945). Namun konsepsi ini masih sulit ditemukan, dikarenakan isu fanatisme daerah yang berlebihan berdampak pada menggeser sistem demokrasi sehingga demokrasi local dan otonomi mengalami dilema dan sistem politik demokrasi mengalami transisi. Sementara elit daerah dianggap bersaing merebut kekuasaan dan tidak peduli pembangunan apalagi kesejahteraan⁴.

Fanatisme, didalam kamus *ensiklopedia* Indonesia jilid 2. Kata fanatisme dikatakan berasal bahasa latin yakni *fonum*, yang artinya tempat suci. sedang *fanaticus* diartikan sebagai kerasukan dewa lalu fanatisme diartikan sebagai ketekunan secara membabi buta dalam berbagai bidang, terutama paling menonjol dibidang keagamaan.

Fanatisme otonomi bisa muncul lebih keras, bila ditunggangi oleh fenomena agama dan kesukuan⁵. Apalagi dengan ruang yang begitu liberal, terkait dengan sistem rekrutmen kader partai dan mental elit yang terbiasa dengan hirarki komando selama 32 tahun. Sistem hirarki dan komando yang dibangun diatas kekuasaan orde baru dengan menjadikan abri, birokrasi,(ABG), sebagai mesin orde baru dengan menjadikan kemajuan ekonomi akibat kenaikan harga minyak, selama hampir dua dasawarsa rezim orde baru yang diperoleh lewat suatu peristiwa G-30/S. mengalami kemajuan selama satu dasawarsa diakibatkan terjadi kenaikan harga minyak, sehingga melahirkan rezim birokratik kapitalis dan menjelang keruntuhannya pada 1980 rezim tersebut menggunakan agitasi dan terror dengan menjadikan tiga kekuatan tunggal dalam negara ABRI, BIROKRASI, dan GOLKAR sebagai pendulum demokrasi di era rezim dictator orde baru. Rezim ini tentunya telah banyak melahirkan kelompok pengeikut yang setia dan sangat berpengaruh

⁴ Bambang P.S. Brojonegoro. *sewindu otonomi daerah, prespektif ekonomi* (Jakarta-KPPOD), H. 1-2

⁵ Khairul Ikhwani Damanik, dkk. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* (JAKARTA, . YOI, 2010). H.xi

terhadap lahirnya suatu rezim baru, yang dibangun diatas dinamika politik pasca reformasi 1998⁶. Dikarenakan terlalu lamanya relasi kekeluargaan dibangun dalam suatu sistim organisasi pemerintah dan militer, sehingga solidaritas maker terhadap atasannya terus menjadi problem sistim namun yang terjadi adalah minimnya kualitas pelayanan birokrasi. Sehingga hal ini terus menjadikan fanatisme sempit atau chauvinism dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan demokratisasi, dimana pasca reformasi demokrasi dilakukan secara langsung di Indonesi, tantangan terhadap masa depan pelaksanaan pembangunan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek fanatisme berlebihan. Sehingga rumusan kibijakan pemerintahan, berdampak pada sulitnya menemukan efek positif dari peralihan sistim demokrasi.

b. Politik lokal dan kartel politik.

Pemilihan kepala daerah atau disingkat dengan pilkada, awalnya dilakukan secara langsung dan kini beralih menjadi secara serempak. Menjadi sebuah eforia yang melahirkan suatu watak yang memerdekakan sehingga mengancam realitas demokrasi, pada dasarnya membicarakan politik local dan otonomi daerah. Karena, membicarakan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat⁷. Karena membicarakan dua level yang berbeda ini merupakan inti untuk mengukur praktek otonomi padahal sesungguhnya dalam bentuk organisasi pemerintahan sesungguhnya organisasi pemerintahan memiliki aturan hukum yang berlaku secara sitematis dan terstruktur serta instruksional yang dijalankan dalam bentuk kepatuhan atas aturan hukum yang berlaku, sehingga katundukan dan kepatuhan atas aturan yang berlaku, jika ditilik dalam aspek hirarki struktur sesungguhnya pemerintahan daerah merupakan tugas yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah dengan menjadikan asas otonomi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, Yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat merupakan peran dan relasi antara actor yang mendapatkan legitimasi dan kewenangan melalui sistim demokrasi langsung baik yang di lakukan dalam bentuk pilkada secara

⁶ Julie scouthwood – Patrick Flanagan. *Terror orde baru. Penyelewengan Hukum dan propaganda 1965-1981*. (Jakarta, komonitas bamboo. 2013). H. XVI.

⁷ Leo agusttino, *sisi gelap otonomi daerah, sisi gelap desentralisasi di Indonesia berbanding era sentralisasi*.(Jakarta, widya padjajaran) h. 6-10.

langsung maupun serempak, diakibatkan terlalu dominannya para actor yang terlibat dalam pelaksanaan demokrasi baik yang berasal dari klen politik, elit adat, dan agama. Yang selama ini memiliki basis riil, dalam kehidupan bernegara. Padahal dalam melaksanakan demokrasi meskinnya, ada kesadaran public yang dapat melahirkan partisipasi public sesuai dengan konsep dan realitas social masyarakat. Namun bangunan partai politik yang multipartai, membuat semua kelas yang pada saat kekuasaan orde baru mendapatkan peran dan status actor yang memainkan peran politik dan ekonomi dalam menjalankan peran dan fungsi aparatus negara selama berlakunya sistim demokrasi yang di bangun berdasarkan sentralisasi menjadikan propaganda untuk memperoleh keusaannya. Dalam perkembangannya kelompok ini disebut dengan actor yang menjadi pemburu rente (*rent-seeking*). Dengan memanfaatkan control atas SDA dengan menjadikan relasi dengan kekuasaan yang birokratik dan kapitalistik pada masa lalu sehingga mampu menjelmakan diri lewat modal nyang diperoleh⁸. Kini kelompok menjadi kelompok actor pemodal dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Konstelasi politik pasca reformasi, melahirkan suatu bentuk kekuasaan baru yang diperoleh lewat prosedur demokrasi namun masih terus diikuti prosesnya oleh kelompok pemburu rente di era orde baru dengan jalan pendirian partai politik, Namun setelah kekuasaan yang diperoleh, lewat proses formil maka ada ketakutan secara psikologi yang muncul dari inself karena menghadapi realitas dunia yang serba tidak pasti, akibat terjadinya pergeseran kekuasaan dengan menjadikan hukum sebagai panglima. Membuat para penguasa memperoleh keusaannya menjadikan terror sebagai alat untuk mempertahankan keusaannya. Agar otritas dan charisma keusaannya terus mendapatkan peran dalam ruang publik dan terhadap para kaum pemburu rente. Dengan demikian terror dan intimidasi terus dijadikan mesin pemerintah untuk menciptakan ketakutan dalam dalam melayani kehendak para bandit yang telah mendanai proses demokrasi baik lokal maupun nasional. suatu sistim demokrasi lewat produk hukum formil para pengusaha tersebut melakukan kompromi dengan para penguasa sehingga terror dan intimidasi menjadi bagian dari aspek yang menghambat tumbuhnya

⁸ Rutch Mc. Vey. *Kaum kapitalis asia tenggara.* (Jakarta YOI). H. 3-20.

demokrasi. Masih terus dijadikan alat untuk elit lokal membangun dinasti kekuasaannya.

Dalam konteks unitary state seperti Indonesia, upaya untuk mencapai tujuan Negara sangat tergantung pada sejauh mana pemerintahnya menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada daerah. Namun secara normative, beberapa undang-undang tentang otonomi dan pemerintahan daerah yang diperundangkan. Merupakan langkah kongkrit, bahwa ada indikasi ketidak siapan para actor dalam menghadapi laju demokrasi langsung dan serempak, dikarenakan mental para actor yang terbangun dari semangat orde baru masih belum siap karena melepaskan status kuo yang selama ini mereka menjadi bagian terpenting dalam proses berdemokrasi, maupun politik untuk menentukan arah jarum jam sistim pemerintahan dan perekonomian di daerah yang selama ini berjalan membuat para actor yang tidak memiliki kemapanan dalam menerima perubahan cenderung mempertahankan status dan relasi antara para actor dan penguasa birokrat yang bermental oportunistis dan pragmatis. Era keterbukaan informasi, juga merupakan salah satu pendorong timbulnya semangat fanatisme kedaerahan dikarenakan pergaulan manusia melewati batas territorial dari aspek budaya dan social. Sehingga kehadiran media, dalam proses kehidupan social membuat bangkitnya rasa solidaritas kebangsaan, suku, agama, dan ras. Dalam menghadapi, kehidupan manusia dalam keterbukaan informasi sebagai buah dari modernism. Dimana demokrasi modern ditandai dengan dominasi tiga hal, yang paling mendapatkan respon signifikan serta sangat mempengaruhi sendi-sendi masyarakat yaitu, ekonomi, militer, dan politik. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya transisi masyarakat dalam menghadapi realitas zaman. bahwa pergeseran suatu tatanan lama ke tatanan baru akan mengakibatkan manusia dalam serba kebingungan sehingga menciptakan lemahnya kepercayaan antara sesama. Pergeseran kekuasaan merupakan pergeseran para elit birokrasi lama ke elit birokrasi baru, yang juga sangat berpengaruh pada penguasaan aset ekonomi merupakan actor yang paling berpengaruh di daerah. Di tengah-tengah, maraknya pelaksanaan demokrasi langsung dan pemekaran daerah cenderung para elit di daerah, memafanfaatkan kondisi ini sebagai cara yang efektif untuk menjadikan isu pemekaran sebagai method yang paling signifikan untuk memikat nurani

rakyat dalam pelaksanaan pemilu, agar kekuasaan dan actor ekonomi yang bermain dalam setiap momentum yang juga merupakan actor yang cukup signifikan mempengaruhi pelaksanaan demokrasi maupun berjalannya pemerintahan pasca terpilihnya para actor yang menjadi pelaku demokrasi.

Setelah kejatuhan seoharto, pada tahun 1998 dan kepresidenan diserahkan kepada B.J.Habibie suatu semangat reformasi demokratis melanda seluruh kepulauan nusantara semangat itu melahirkan apa yang diebut dengan semangat *etnosentrisme* yang juga membawa dampak pada berbagai dinamika konflik komunal di beberapa daerah yang melanda negara ini saat diperhadapkan dengan transisi kekuasaan dan krisis ekonomi yang melanda berdampak pada terjadinya krisis multidimensi. Krisis ini merupakan perbincangan,dalam politik lokal sangat memberikan impak dalam pelaksanaan politik lokal dikarenakan politik lokal pasca orde baru yang diametral. Keadaan ini disebabkan oleh keadaan yang berkelindannya, tarik-menariknya kepentingan pusat dan daerah, ditambah lagi wujudnya otonomi daerah dan pemekaran daerah (redistricting). Percampuran masalah tersebut inilah, yang kemudian memberikan corak tersendiri terhadap politik lokal karena hasilnya yang beraneka ragam. Tetapi jika hendak disederhanakan,keanegaragaman tersebut menghadirkan dua implikasi, pertama ia melahirkan kebaikan bersama bagi masyarakat dan yang kedua sebaliknya. Kebaikan bersama, yang dapat dijadikan klaim disini diantaranya (seperti) pegawai negeri sipil kini lebih berwajah abdi masyarakat.

Mulai wujud peningkatan,pelayanan administrasi yang lebih berwajah “abdi masyarakat” mulai wujud peningkatan pelayanan administrasi yang lebih baik dan dekat dengan publik. Infra struktur yang lebih memanusiaikan manusia, pelayanan kesehatan yang cukup memuaskan untuk beberapa daerah namun untuk daerah lain masih sangat jauh dari realitas memuaskan, sering terjadi pada daerah otonomi baru.

Kondisi politik lokal di Indonesia,saat ini juga menunjukan secara formil cukup realistis, dengan dibiarkanya masyarakat memilih secara langsung kepala daerah oleh warga. Sekaligus mengurangi proses droping elit dari pusat ke daerah,seperti yang dialami saat orde baru, mulai bermunculanya kepala-kepala daerah perempuan dan terealisasinya secara baik keuangan ke daerah yang lebih adil dibandingkan sebelumnya.

Walaupun demikian politik lokal paska orde baru pun melahirkan dampak negatif dengan asumsi selalu ada *free-rider(s)* dalam setiap transformasi politik. Begitu pula, halnya ketika mekanisme dan logika baru politik hadir paska lengsernya soeharto. Untuk memahami dampak negatif tersebut, dapat kita ajukan beberapa pertanyaan, pertama mengapa muncul dampak negatif paska orde baru? Apakah hal itu disebabkan oleh legasi politik masa lalu? Dan, apa sebenarnya kenegatifan yang wujud? Untuk mendapatkan temuan yang otoritatif, metode pengumpulan harus menggunakan metode pengumpulan data dari sumber literature yang dipilih secara selektif agar dapat mengkaji konsep dan unit analisis. Politik paska orde baru, merefleksikan logika dan mekanisme, politik baru bagi masyarakat (dan elit) disemua lefel kepolitikan. Politik baru, menggambarkan resistensi terhadap politik lama yang otokratik, represif, dan memusat (sentralisme). Interpertasi atas politik baru, selain sebagai bentuk perlawanan juga dipahami sebagai bentuk polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi.

Polisentrisme sendiri diartikan, secara sederhana sebagai perjuangan kolektif masyarakat atau daerah untuk menolak ide dan gagasan lama (atau penguasa) yang dianggap telah melemahkan identitas dan kekuasaan mereka. Sebagai dampak dari tumbuhnya polisentrisme di Indonesia, lanskap politik di lefel lokal pun turut berubah. Otonomi daerah, *redistricting* dan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Atau pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai wujudnya. Namun demikian, tidak semua kemunculan politik baru menghadirkan kebaikan bersama bagi warga masyarakat.

Kasus mengenai hadirnya elit politik informal dan politik lokal, memang tengah mewabah di negara demokrasi baru paska runtuhnya demokrasi otokratik. Negara-negara demokrasi yang dikenal dengan *people power*, dewasa ini dijamuri oleh elit informal yang gandrung menjadi elit formal politik (Sidel 1999). Para elit ekonomi ini tidak hanya bergelombang di kancah politik nasional, tetapi juga menyusup ke areal lokal. Posisi ini di sasar karena hasilnya sangat menguntungkan bagi bos-bos ekonomi di kemudian hari, khususnya atas pengendalian dan pengaturan langsung sumber-sumber daya (kekayaan daerah) serta hak-hak istimewa di aras lokal. Kendali atas konsesi lahan, control terhadap hukum, penentuan atas

pengangkatan dan penunjukan pegawai, pembagian kontrak kerja, dan lain sebagainya menjadi tujuan para bos-bos ekonomi⁹.

Dinamika politik lokal Indonesia selalu berubah sepanjang waktu. Pada era sebelum kemerdekaan misalnya, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret yang muram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat tradisional yang totaliter. Akibat sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba bukan warga, dan mereka juga tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu. Mala sebaliknya, masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak kepada mereka. Pelbagai bentuk pajak dan upeti yang ditarik oleh penguasa melalui aparat represifnya menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk.

Ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada tahun 1997, dalam tempo yang tidak terlalu didetonatori oleh gerakan mahasiswa berhasil menghancurkan kuasa pusat di Jakarta. Ambruknya orde baru, sekaligus menandai polisentrisme baru yang menolak kuasa pusat (*decentring*). Dengan menggantungkan harapan yang sangat tinggi pada jiwa zaman saat itu (*reformasi politik*), otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 sangat berpengaruh signifikan terhadap pembentukan strukturasi sosial baru yang memberikan pengaruh signifikan terhadap konsolidasi sosial masyarakat, sehingga kondisi politik lokal maupun nasional mengalami ketidak pastian. Semangat baru, yang terpatri atas nama semangat nasionalisme, di bangun lewat kedaerahan membawa dampak tidak terealisasinya demokrasi yang di harapkan justru malah membentuk klas sosial baru yang dalam pandangan politik lokal dan nasional di kenal dengan kalangan dinasti baru yang membentuk slogan mencari rezeki saat musim politik tiba.

Intra-aksi seperti terurai diatas, banyak terjadi di Indonesia pasca orde baru, munculnya dan merasuknya kipra orang-orang kuat lokal, juga sangat terlihat jelas dalam setiap daerah di Indonesia. Dominasi oleh kelompok-kelompok preman yang saling bersaing, beberapa di antaranya bahkan memiliki hubungan yang rapat dengan purnawirawan petinggi tentara dan polisi. Selain orang kuat lokal, actor lain yang memainkan peran politik baru setelah orde baru adalah para pengusaha tingkat menengah yang sangat

⁹ Jhon harriss, et,all. *Politisasi Demokrasi, Politik Lokal Baru*. (Jakarta. DEMOS. 2005). H. 71.

mengharapkan pilot proyek pemerintah dan aktivis yang terkait dengan organisasi yang terkait dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Dalam konteks lain, politik lokal juga mesti dipahami sebagai arena persaingan antara tiga kekuatan besar. (I) birokrat yang berlatar belakang bangsawan yang berhasil bertahan hidup melewati berbagai macam rezim sejak periode colonial, (II) birokrat yang berasal dari rakyat awam kebanyakan, dan (III) para lokal strongmen. Persaingan ini terkadang berwajah aneh karena ada kalanya mereka bersekutu, tetapi dilain kesempatan mereka saling memangsa. Persaingan ketiga kekuatan, ini misalnya dapat terlihat dengan jelas dalam proses redistricting. Karena trend kekuasaan di tingkat lokal, pada umumnya masih terhimpun ditengah sejumlah politisi berlatar belakang birokrat awam, maka ketika mereka kurang berhasil melaksanakan amanat otonomi, kelompok birokrat lainya (yang berlatar belakang bangsawan) memanfaatkan kesempatan ini untuk menentang pemerintahan yang eksis. Penentangan ini kurangnya tidak jarang diasakan, pada bayangan kejayaan bangsawan masa lalu, selain juga dilandaskan pada tuntutan pelayanan dan sebagainya.

Oleh sebab itu, persetujuan antara kelompok yang menuntut dan yang menolak pemekaran menjadi semakin membara ketika para lokal strongmen turun tangan dengan menyertakan anak buah mereka. Peran serta lokal strongmen ini dilandasi oleh harapan akan masa depan atas pembagian kue pembangunan di daerah baru dan lainnya sehingga memotivasi mereka untuk membela mati-matian para birokrat sokongannya.

C. Penutup

Sistem demokrasi yang dibangun di atas perkembangan zaman, melahirkan beberapa decade yang dialami oleh masyarakat dunia sehingga dalam perkembangan selanjutnya kita kenal dengan istilah demokrasi dunia ketiga, dimana demokrasi pada masa sebelumnya di sebut dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kemudian pemerintahan Negara bangsa dengan menjadikan industry dan ideologi sebagai basis need dalam membangun sistem demokrasi. Di era modern, demokrasi dijadikan sebagai ruang kompetisi antara mereka yang memiliki kapasitas dengan tidak melihat dari mana dia berasal asalkan saja ada sistem demokrasi yang baik sehingga bisa menjadi bagian dari rakyat.

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjalankan sistem politiknya secara demokrasi telah melewati tiga fase yang paling berarti dalam ketatanegaraan Indonesia dimana pada era orde-lama dikenal dengan demokrasi terpimpin, dan orde baru dengan demokrasi pancasila, dan orde reformasi secara realitas sangat liberal. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kewenangan dan sistem politik yang dijalankan lewat mekanisme suara terbanyak padahal secara ideologi kalimat hikmah merupakan kata kunci demokrasi ekonomi begitu juga sistem sosial yang lain secara konstitusi memberikan kewenangan terhadap daerah dan pusat dalam melakukan rumusan-rumusan kebijakan pemerintahan.

Peralihan sistem dari orde ke orde, berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma dan sistem sosial. Namun secara riil masyarakat belum memiliki kesiapan dalam melaksanakan demokrasi, secara ideal karena demokrasi merupakan suatu bentuk nyata pemerintahan modern yang secara praktis memiliki ketersediaan kelas ekonomi yang mapan dan ketersediaan sumber daya manusia yang mapan, bahwa demokrasi akan berjalan menjadi suatu sistem politik dan pemerintahan yang baik manakala tersediannya kelas yang dimaksud diatas, dapat menjadi aktor dalam memainkan jalannya demokrasi yang dibutuhkan sesuai dengan statute dan konstitusi rakyat. ketidak siapan dapat terlihat secara capital social maupun capital ekonomi sebagai wadah yang dapat dikembangkan sebagai elemen strategis yang dapat dikelola dalam tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan yang *good governance* dan *clear governance* sehingga melahirkan aparatus Negara yang tidak parkinsonisme dan koruptor, namun aparatus yang rasional dalam mengelola suatu sistem demokrasi. dengan demikian harus ada sistem politik demokrasi yang partisipatif bukan mobilitas dan propaganda. Politik dengan menjadikan aturan formal dan beraliansi dengan kelompok aktor dan pemodal, baik nasional maupun local untuk menciptakan sistem dan menyediakan calon serta financial dalam demokrasi langsung. Untuk itu harus ada sistem demokrasi deliberative, dengan mekanisme check and balance. Sehingga fungsi edukasi politik dapat berjalan sesuai dengan fungsi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang P.S. Brojonegoro. *Sewindu Otonomi Daerah, Prespektif Ekonomi* Jakarta-KPPOD 2004.
- Damanik, Khairul Ikhwan ,dkk. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* Jakarta,. YOI, 2010.
- D.C, Coyle. *Sistim Politik suatu Negara Demokrasi* Djakarta, Endang 1955.
- Harris, Jhon, et,all. *Politisasi Demokrasi, Politik Lokal Baru*. Jakarta. Demos. 2005.
- Hungtington, S.P.*Gelombang Demokratisasi Ketiga* Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Julie scouthwood – Patrick Flanagan. *Terror Orde Baru. Penyelewengan Hukum dan propaganda 1965-1981*. Jakarta, Komonitas Bambu. 2013.
- Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma *Demokrasi dan Proses Politik*.Jakarta-LP3ES, 1986.
- Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Perbandingan Era Sentralisasi*.Jakarta, Widya Padjajaran 2011.
- Rutch Mc. Vey. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*.Jakarta Yoi 1998.